

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GERAKAN KEMBALI BERSEKOLAH: ANALISIS MODEL GRINDLE DALAM PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH DI KABUPATEN BREBES

Lukmanul Hakim<sup>1(a)</sup>, Izzatusholekha<sup>2(b)</sup>, Maya Puspita Dewi<sup>3(c)</sup>, Endang Rudiatin<sup>4(d)</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Magister Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

<sup>a)</sup>lukmanul\_h.22010500003@student.umj.ac.id, <sup>b)</sup>izzatusholekha@umj.ac.id, <sup>c)</sup>maya.pd@umj.ac.id,

<sup>d)</sup>endang.rudiatin@umj.ac.id

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

06-04-2025

Diterbitkan Online:

30-06-2025

#### Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan,  
Gerakan Kembali Bersekolah,  
Anak Tidak Sekolah, Model  
Grindle

#### Keywords:

Policy Implementation, Back  
to School Movement, Children  
Not in School, Grindle Model

#### Corresponding Author:

lukmanbrebes78@gmail.com

#### DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i2.1208>

### PENDAHULUAN

Setiap anak mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh orang tua, masyarakat dan pemerintah mencakup hak hidup, tumbuhkembang, perlindungan dan partisipasi. Salah satunya dari hak tumbuhkembang anak adalah hak memperoleh pendidikan yang layak. Hal ini tertuang dalam Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa seluruh warga negara, termasuk anak penyandang disabilitas dan anak kurang mampu, berhak mendapatkan pendidikan. Sedangkan dalam Undang-Undang

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi GKB dalam memenuhi Hak Anak di Kabupaten Brebes. Analisis terhadap implementasi GKB ini menggunakan teori Merilee S. Grindle dengan indikator isi implementasi meliputi : Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa serta tingkat kepatuhan dan responsivitas pelaksana. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam program GKB tersebut yaitu mengeluarkan regulasi dan monitoring pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 115 tahun 2017 tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan 12 Tahun Kabupaten Brebes. Agar regulasi berjalan sesuai dengan target GKB, maka Pemerintah Kabupaten Brebes harus meningkatkan monitoring pelaksanaan GKB tersebut.

### ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the GKB in fulfilling children's rights in Brebes district. This analysis uses Merilee S. Grindle's theory with implementation content indicators including: Power, interest and strategy of actor involved, Institution an regime characteristic and Compliance and responsiveness. The data sources used in this research came from observations, interviews and documentation studies. The results of this study found that stakeholders have an important role in the GKB program, namely issuing regulations and monitoring the implementation of the regulation.

Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Angka 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai usia delapan belas tahun, termasuk anak didalam kandungan.(BAPPENAS RI 2002).

Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Riyadiningsih and Astuti 2013).

Pada tahun 2013, Pemerintah Pusat menggalakkan program wajib belajar 12 tahun yang disebut Program Pendidikan Menengah Umum sebagai proses lanjutan dari program wajib belajar sembilan tahun. Dengan diadakannya program lanjutan ini bertujuan untuk menjaga keberhasilan dan berlangsungnya program sebelumnya yakni wajib belajar (wajib) 9 tahun serta mempersiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Namun sering kita jumpai anak-anak yang putus sekolah. Ini membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia masih timpang dan program tersebut belum sepenuhnya berhasil. (Margiyanti dan Maulia 2023).

Penelitian terkait Implementasi Gerakan Kembali Bersekolah dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Brebes bukan yang pertama kali dilakukan, sebelumnya telah ada beberapa peneliti yang sudah melakukan kajian tentang ini di berbagai tempat.

Penelitian pada Journal of Politic and Government Studies, Vol.13 No.2 Februari 2024. Judul : Evaluasi Program Gerakan Kembali Bersekolah Tahun 2018 – 2022 di Kabupaten Brebes. (Syu'la,2024).

Metode pada penelitian ini menggunakan kualitatif, dengan melakukan interview dan dokumentasi. Teknik pengambilan data menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Menurut hasil penelitian terkait evaluasi Program Gerakan Kembali Bersekolah di Kabupaten Brebes untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi pada Program GKB belum sepenuhnya berhasil. Meskipun evaluasi rutin dilakukan setiap tahunnya oleh Tim GKB, FMPP, Baperlitbangda, Dindikpora dan stakeholder lainnya yang terlibat, namun strategi yang dilakukan belum mampu memberikan solusi atas permasalahan yang ada. (Syu'la 2024).

Pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu fokus pada implikasi pelaksanaan Program Gerakan Kembali Bersekolah terhadap penurunan angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Mengamati prosesnya dari dua sisi, implikasinya melalui dua cara yakni meneliti dari sisi anak didiknya dan penggerak program GKB. Sementara, penelitian-penelitian terdahulu membahas

pelaksanaan program dengan berbagai metode, faktor penghambat dan faktor pendorong.

Kabupaten Brebes merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah 1.769,62 Km2 dan jumlah penduduk mencapai 2.043.077 jiwa meliputi 17 Kecamatan, 292 Desa dan 5 Kelurahan dengan pusat ibukota berada di Kecamatan Brebes. (Badan Pusat Statitika 2023). Keterjangkauan pelayanan dasar menjadi problem di Kabupaten Brebes karena wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang besar, salah satunya adalah akses terhadap Pendidikan. Menurut sumber data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Brebes, data awal Anak Tidak Sekolah (ATS) tingkat SD/MI, SMP/Mts dan SMA pada tahun 2018 sebanyak 17.420 anak di 17 kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1. Data awal Anak Tidak Sekolah (ATS) Kabupaten Brebes Tahun 2018**

NO	NAMA KECAMATAN	PUTUS SEKOLAH/ DROP OUT					JUMLAH SELURUHAN
		SD/ MI		SMP/ Mts		SMA	
		PUTUS DIKELAS	TAMAT TIDAK MELANJUTKAN	PUTUS DI KELAS	TAMAT TIDAK MELANJUTKAN	PUTUS DIKELAS	
1	BANJARHARJO	204	528	88	316	17	1.153
2	BANTARKAWUNG	113	826	202	805	89	2.035
3	BREBES	258	225	125	109	43	760
4	BULAKAMBA	499	414	171	175	33	1.292
5	BUMIAYU	78	80	107	180	67	512
6	JATIBARANG	126	416	82	316	39	979
7	KERSANA	47	109	37	121	12	326
8	KETANGGUNGAN	184	522	242	367	44	1.359
9	LARANGAN	248	436	188	317	71	1.260
10	LOSARI	327	667	255	559	91	1.899
11	PAGUYANGAN	122	331	215	448	79	1.195
12	SALEM	64	231	114	546	62	1.017
13	SIRAMPOG	69	76	83	150	32	410
14	SONGGOM	56	303	22	275	14	670
15	TANJUNG	131	494	155	373	67	1.220
16	TONJONG	45	197	73	321	54	688
17	WANASARI	270	124	90	103	58	645
TOTAL		2.841	5.979	2.249	5.481	872	17.420

Sumber: Dapodik Kabupaten Brebes, 2023

Hal ini menginisiasi Komunitas Facebook Celoteh Brebes Membangun (CBM) untuk membentuk Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) pada tahun 2015, dengan mengembalikan anak yang tidak sekolah dan melakukan penggalangan dana secara swadaya dari masyarakat. Saat itu komunitas Facebook CBM melakukan pendampingan terhadap anak tidak sekolah dan berhasil mengembalikan 30 anak ke sekolah yang tersebar di wilayah Kecamatan Larangan dan Ketanggungan. Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2015, sebagai upaya mewujudkan akselerasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Larangan, komunitas Facebook CBM melaunching Gerakan Kembali Bersekolah di tingkat Kecamatan.

**Gambar 1. Launching Program Gerakan Kembali Bersekolah**



Sumber: Dokumentasi Komunitas CBM, 2015

Dalam prosesnya, ditemukan berbagai kendala dan hal tersebut ditindaklanjuti melalui Focus Group Discussion (FGD) di level pemerintah Kabupaten Brebes secara intensif, hingga akhirnya pada tahun 2017 program GKB tersebut diadopsi secara formal sebagai kebijakan dari Kabupaten Brebes. Kebijakan tersebut melibatkan berbagai stakeholder seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Media, dan perwakilan Kepala Desa serta pengurus Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) yang telah terbentuk.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten mulai bergerak dengan melibatkan relawan Celoteh Brebes Membangun (CBM), untuk masuk dalam kelembagaan resmi yang dipayungi regulasi Pemerintah Kabupaten melalui FMPP yang dikukuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes pada tahun 2016.

Pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu fokus pada implikasi pelaksanaan Program Gerakan Kembali Bersekolah terhadap penurunan angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Mengamati prosesnya dari dua sisi, implikasinya melalui dua cara yakni meneliti dari sisi anak didiknya dan penggerak program GKB. Sementara, penelitian-penelitian terdahulu membahas pelaksanaan program dengan berbagai metode, faktor penghambat dan faktor pendorong.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Fokus penelitian ini adalah untuk meneliti implementasi program Gerakan kembali

Bersekolah dalam rangka Pemenuhan Hak anak di Kabupaten Brebes. Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Brebes, Dinas Sosial Kabupaten Brebes dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperlitbangda) Kabupaten Brebes. Observasi, wawancara dan studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Untuk memilih informan, peneliti menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah informan sebanyak 15 orang.

**Tabel 2. Jumlah Informan Wawancara**

No.	Jabatan	Jumlah Informan	Informasi yang dicari
1	Kepala Dindikpora Kab Brebes	1 orang	Regulasi, anggaran
2	Kepala Baperlitbangda Kab. Brebes	1 orang	Komitmen GKB, regulasi,
3	Ketua Tim GKB Kabupaten Brebes	1 orang	Komitmen program GKB
4	Kabid Dinas Sosial Kab. Brebes	1 orang	Korelasi kemiskinan dengan program GKB
5	Pengusaha Kabupaten Brebes	2 orang	Kesesuaian kurikulum dengan dunia kerja
6	Tokoh masyarakat / Pengamat Pendidikan	2 orang	Pendapat program
7	Kepala Sekolah	2 orang	Kemanfaatan program GKB,
8	Anak penerima bantuan GKB	3 orang	Motivasi, manfaat
9	Ahumni Penerima bantuan GKB	2 Orang	Setelah lulus apakah sudah bekerja
<b>Jumlah Informan</b>		<b>15 orang</b>	

Sumber: Penelitian, 2024

Metode ini dipilih karena mempertimbangkan informan yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan. Waktu penelitian selama 2 bulan, dimulai bulan Juni – Juli 2024. Informan dalam penelitian ini beragam dan juga yang memiliki kecakapan pengetahuan terkait penelitian. Tentu saja informan yang akan memperkuat data penelitian bagaimana implementasi program Gerakan kembali Bersekolah dalam rangka Pemenuhan Hak anak di Kabupaten Brebes. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara simultan dalam tiga rangkaian yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/validasi.

Pada tahap reduksi, data yang terkumpul kemudian diseleksi, dirangkum, dan disesuaikan dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Data tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam kategori tertentu dan dicari tema serta polanya berdasarkan rumusan masalah yang telah dikembangkan. Penyajian data atau tampilan data dengan memberikan gambaran lengkap tentang penelitian atau menyajikan data

secara detail dan komprehensif dengan mencari pola hubungan.

Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti menyajikan dalam bentuk pernyataan singkat mengenai peran Implementasi program Gerakan Kembali Bersekolah dengan mengacu pada tujuan penelitian. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

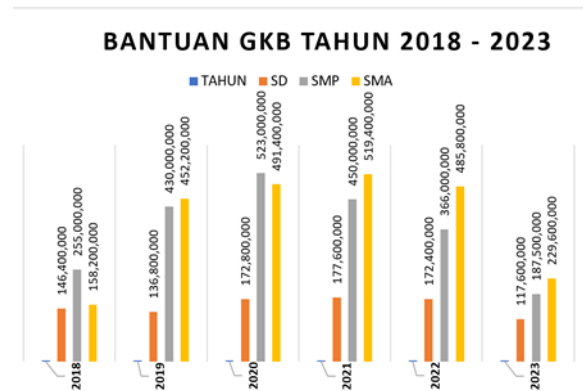
## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini merujuk pada sumber data dan fakta di lapangan serta dari hasil wawancara dengan informan terkait. Indikator ini berfungsi sebagai tolok ukur apakah penyesuaian berhasil dilakukan. Hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai masukan untuk peningkatan keberhasilan program.

Gerakan Kembali Bersekolah yang diinisiasi pada tahun 2017 telah menggelontorkan anggaran untuk bantuan anak tidak sekolah (ATS) sejak tahun 2018. Pagu anggaran berdasarkan Perbup No. 49 Tahun 2022, untuk anak SD/MI sebesar Rp800.000, anak SMP/MTs sebesar Rp1.000.000 dan anak SMA/SMK/MA sebesar Rp1.400.000. Pemerintah Kabupaten Brebes telah menggelontorkan anggaran sejak tahun 2018 awal menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes menggelontorkan bantuan total anggaran sebesar Rp559,6 juta. Tahun 2019 sebesar Rp1.019.000.000, tahun 2020 sebesar Rp1.187.200.000 dan tahun 2021 sebesar Rp1.147.000.000. Sementara itu, mulai tahun 2022 pencairan bantuan melalui 2 tahap. Untuk Tahap 1 pada tahun 2022, bantuan total anggaran Rp546.900.000 dan tahap 2 Rp477.300.000, sehingga total Rp1.024.200.000. Pada tahun 2023, tahap 1, bantuan total anggaran senilai Rp262.100.000 dan tahap 2 senilai Rp272.600.000, sehingga total Rp534.700.000.

Pemerintah Kabupaten Brebes telah membentuk Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) di tingkat kabupaten dan Kecamatan, dan dengan dukungan ATS, melakukan pendampingan dan pengembalian ATS, penggalangan dana, mendukung penguatan pendidikan anak, penurunan angka ATS.

Gambar 2. Grafik Data Bantuan GKB Tahun 2018-2023



Sumber: Penelitian, 2024

Berdasarkan Grafik perkembangan data bantuan yang diberikan kepada siswa dari SD/MI hingga SMA/SMK/MA dari tahun 2018 hingga 2023, ternyata ada penyusutan jumlah bantuan yang diberikan pada tahun 2023.

Pembahasan penelitian ini berdasarkan indikator implementasi kebijakan (Grindle, 1980) yang berfungsi sebagai tolok ukur apakah penyesuaian berhasil dilakukan. Pembahasan dari hasil penelitian meliputi adanya hasil wawancara lapangan, observasi dan studi dokumentasi, yang dilakukan di lapangan terkait pelaksanaan program Gerakan Kembali Bersekolah. Menurut hasil dan observasi, pembahasan tentang hasil penelitian ini merujuk pada isi implementasi meliputi tiga indikator implementasi kebijakan (Grindle, 1980) yakni : (1) Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat, (2) Karakteristik lembaga dan penguasa, (3) Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana program.

### Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat

Implementasi kebijakan melibatkan berbagai aktor kepentingan. Aktor yang terlibat mungkin optimal dalam pelaksanaan atau tidak. Maka dari itu perlu diperhitungkan seberapa besar pengaruh kekuasaan serta kepentingan dari aktor dalam implementasi kebijakan. Apabila hal ini tidak diperhitungkan maka kemungkinan kebijakan yang dilaksanakan menjadi gagal.

Keterlibatan pemimpin sangat penting dalam mendukung pengembangan program GKB. Kebijakan pengambil keputusan pimpinan ketika mempunyai kesadaran untuk pemenuhan hak anak dalam pendidikan agar bisa terpenuhi di wilayahnya, maka ia akan

terlibat dan memiliki kepentingan untuk menurunkan data anak tidak sekolah. Sehingga Gerakan Kembali Bersekolah menjadi terobosan dari pengambil keputusan oleh seorang pemimpin untuk menyelesaikan atau menuntaskan program Anak Tidak Sekolah (ATS).

### **Karakteristik Lembaga dan Penguasa**

Karakteristik dari lembaga dan kepala daerah di tempat penerapan program yang dijalankan sangat berpengaruh pada proses berjalannya kebijakan. Sebuah kebijakan perlu melihat sejauh mana kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang digunakan oleh pemangku kepentingan. Pergantian kepala daerah juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan program, karena memerlukan adaptasi dan pengenalan program untuk memahami dan memandang perlu.

Dalam wawancara dengan ketua tim GKB Kabupaten Brebes mengungkapkan bahwa lambat atau cepatnya program sangat bergantung pada kebijakan dari Kepala daerah atau Bupati. Pergantian Bupati juga sangat berpengaruh dengan berjalannya sebuah program. Tingkat dukungan Bupati berbeda-beda, apalagi di kabupaten Brebes mengalami pergantian dua kali Bupati. Pada awal launching GKB oleh Bupati yang dipilih oleh rakyat secara langsung melalui Pilkada, setelah jabatannya habis diganti dengan dua Pj Bupati Brebes. Dirinya juga mengungkapkan dampak dan karakteristik instansi yang terlibat dalam mempengaruhi program GKB, sehingga berjalan dengan lancar. Kalau karakteristiknya menunggu tidak akan berhasil, jangan wait and see, sehingga OPD harus jempot bola. Hal ini berdampak pada pembiayaan yang bertambah. Pemerintah Daerah, jangan wait and see, tetapi syaratnya adalah mereka harus bergerak, ada orang yang khusus menangani anak ATS saja, tidak menangani yang lain.

### **Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap Pelaksana Program**

Implementasi kebijakan mempunyai sebuah tujuan yang harus dicapai, tercapainya suatu tujuan tersebut dipengaruhi kepatuhan pemangku kepentingan. Responsivitas dari pemangku kepentingan akan mencapai tujuan tersebut, pemangku kepentingan juga berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagai aktor untuk menyelaraskan tujuan yang dicapai. Terkait kepatuhan dan daya

tanggap pada program Gerakan Kembali Bersekolah menurut hasil wawancara dengan Kepala Dindikpora Kabupaten Brebes mengungkapkan bahwa terkait kepatuhan itu semuanya patuh, hanya butuh pendampingan. Sebagai contoh pendampingan dana desa untuk Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Dewasa Tidak Sekolah (DTS), tidak semuanya melaksanakan karena kurangnya pendampingan secara langsung.

Pendampingan itu sangat diperlukan untuk pengawalan program agar berjalan dengan lancar. Komitmen dengan GKB dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Brebes akan melaksanakan GKB dan tetap melakukan inovasi-inovasi, peluang-peluang, tantangan dengan menggunakan analisis yaitu ada peluang, tantangan dan kendala. Kemudian dari analisis itu nanti akan dievaluasi bersama untuk menentukan kebijakan, melakukan inovasi yang lebih punya serapan tinggi untuk menuntaskan program Gerakan Kembali Bersekolah.

### **PENUTUP**

Analisis Implementasi Program Gerakan Kembali Bersekolah Kabupaten Brebes dari tiga indikator sebagai berikut: Kekuasaan Kepala Daerah dalam mengambil kebijakan melibatkan semua pihak mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program. Kepentingan atau misi pada program GKB lebih bersifat untuk kepentingan umum, yakni kepentingan masyarakat Kabupaten Brebes. Strategi yang digunakan oleh tim GKB dan FMPP disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Membutuhkan sinergitas antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjalankan program Gerakan Kembali Bersekolah. Dukungan pemimpin daerah sangat diperlukan untuk menunjang jalannya program, sehingga diharapkan mampu secara maksimal menurunkan angka ATS dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Brebes. Kepatuhan dan daya tanggap oleh stakeholder belum sepenuhnya terlaksana dalam pengembangan program Gerakan Kembali Bersekolah di Kabupaten Brebes. Program "Gerakan Kembali Bersekolah" Kabupaten Brebes berimplikasi terhadap penurunan angka ATS tidak terlalu signifikan, sehingga perlu ditingkatkan lagi jumlah penerima manfaat yang dialokasikan dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sumber

penganggaran diharapkan tidak hanya tergantung dari APBD saja, namun bisa dari dana desa, Corporate Social Responsibility (CSR), Badan Amil Zakat Nasional dan lainnya. Makanya perlu political will, keinginan politik dari kepala daerah untuk meneruskan program GKB. Selain itu juga kapasitas Sumber Daya Manusia aparatur di daerah juga belum mumpuni, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas. Hal ini menjadi catatan bagi pemerintah Kabupaten Brebes untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kapasitas demi pemenuhan hak anak mendapatkan pendidikan layak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, cetakan kelima. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Harahap, N. (2020). Penelitian Kualitatif. Medan : Wal ashri Publishing.
- Grindle, M. S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World.
- Satspi, Evi dan Taufiqurokhman (2019) Design dalam Kebijakan Publik : Teori dan Aplikasinya. Jakarta : UMJ Press 2018.
- Badan Pusat Statitika. 2023. “Kabupaten Brebes Dalam Angka Dalam Angka Brebes Regency In Figures 2023.” *BPS Kabupaten Brebes, No: 33290.2309*, 1–389. <https://brebeskab.bps.go.id/>.
- Badasyari, Ittasaqa. 2022. “Program Dinas Dan Pendidikan Kebudayaan Kota Tegal Dalam Mengatasi Angka Putus Sekolah.” *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan* 11 (2): 52–65. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/sakp/article/download/18021/17338>.
- BAPPENAS RI. 2002. “Undang - Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *Arsyad, Azhar*, no. 190211614895: 1–44. <https://jdihn.go.id/files/4/2002uu023.pdf>.
- BPS Kabupaten Brebes. 2015. “Statistik Daerah Kabupaten Brebes 2015.”
- Budi Lestari, Ayu Yeni, Fariz Kurniawan, and Rifal Bayu Ardi. 2020. “Penyebab Tingginya Angka Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah Dasar (SD).” *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar* 4 (2): 299. <https://doi.org/10.23887/jisd.v4i2.24470>.
- Populix (2023) *Informan Penelitian: Definisi, Kriteria, Contoh*. Diakses pada 2 Mei 2024, dari <https://info.populix.co/articles/informan-adalah/>
- Syu’la, Abidah Nabilah. 2024. “Evaluasi Program Gerakan Kembali Bersekolah Tahun 2018 – 2022 Di Kabupaten Brebes” 13: 1–15.